

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Tujuh Perseroan di DKI Terapkan SMAP

Cempaka Putih, Warta Kota

Tujuh perseroan daerah milik Pemprov DKI Jakarta menerapkan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP). Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Usaha Infrastruktur BP BUMD DKI Jakarta Budi Purnama.

"Beberapa BUMD yang telah menerapkan SMAP hingga triwulan ketiga di tahun 2022 ada tujuh BUMD," kata Budi saat peluncuran whistle blowing system (WBS) dan Integrasi Teknologi Informasi JXB di Grand Cempaka Hotel, Jakarta Pusat pada Senin (12/12).

Budi menjelaskan, tujuh BUMD yang menerapkan SMAP adalah PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PT Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Pasar Jaya, PT Bank DKI, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Eco Green, PT MRT Jakarta, PT Transjakarta dan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Kata dia, pada dasarnya SMAP dengan WBS yang digarap PT Jakarta Tourisindo (Jaktour) atau JXB itu hampir sama, yaitu memberantas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

"Sebagai sarana pendukung dari SMAP, yaitu dibangunnya sistem pelaporan pelanggaran seperti yang digagas teman-teman dalam whistle blowing system, sebagai implementasi GCG (good corporate governance/tata kelola perusahaan yang baik) pada perusahaan tersebut," jelas Budi.

Menurut dia, sistem ini akan fokus pada beberapa masalah yang mengarah pada KKN. Mulai dari penyimpangan aturan, penyalahgunaan jabatan, perbuatan curang, gratifikasi dan sebagainya.

"Saya berikan mereka (tujuh BUMD) apresiasi, karena memberikan semangat kepada Jaktour untuk menerapkan SMAP. Ini yang sudah bersertifikat (ISO 37001) adalah Jakpro, Food Station Tjipinang Jaya, MRT Jakarta dan

Transjakarta, mudah-mudahan BUMD yang lain segera mengeikuti," ungkapnya.

Dalam rangka pencegahan korupsi di BUMD, kata dia, Pemprov DKI Jakarta rutin melakukan bimbingan kerja sama dengan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, jajaran dewan direksi, komisaris dan manajemen di perseroan mengawasi kinerja pegawainya.

"Saya berharap dari whistle blowing system itu semua berperan aktif dalam jalannya roda perusahaan, sehingga praktik kecurangan bisa dideteksi dini," ujarnya. "Nantinya mereka bisa menjadi agen perubahan menuju perusahaan yang lebih bersih dan ke arah yang lebih baik lagi," lanjutnya.

Mitigasi korupsi

Sebelumnya, PT Jakarta Tourisindo (Jaktour) atau yang biasa disebut JXB (Jakarta Experience Board) meluncurkan whistle blowing system (WBS). Langkah ini dilakukan untuk upaya mitigasi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) atau praktik pidana lainnya di tubuh perseroan.

Direktur Operasional dan Transformasi Digital JXB Andi Permadi mengatakan, WBS dan integrasi informasi teknologi menjadi bentuk pengawasan dan pencegahan terhadap tindakan penyimpangan. Adapun penyimpangan ya mulai dari norma hukum peraturan perundang-undangan, internal perusahaan maupun norma masyarakat.

"Peluncuran ini menjadi tindak lanjut dari pembenahan internal terkait perwujudan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG)," kata Andi dalam sambutannya saat peluncuran WBS dan Integrasi Teknologi Informasi JXB di Grand Cempaka Hotel, Jakarta Pusat pada Senin (12/12). (faf)